



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIYATNO**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **19153**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m²/164 m² di MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m²/90 m² di MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/160 m² di MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/140 m² di KOTA MOJOKERTO , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/90 m² di KOTA MOJOKERTO , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 659.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RUSH MINI BUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 99.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	884.628.678
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.693.128.678
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.693.128.678

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.